

**TESIS**

**PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA  
TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018  
(STUDI DI KOTA PEKANBARU)**



**OLEH :**

**KHARISMA DESCALIANI  
1720122039**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H  
Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS  
ANDALAS PADANG  
2020**

**PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA TERBITNYA  
PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018  
(STUDI DI KOTA PEKANBARU)**

**(Kharisma Descaliani, 1720122039, Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, 2020)**

**ABSTRAK**

Badan usaha merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah persekutuan komanditer. Persekutuan Komanditer merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terkait pendirian persekutuan komanditer, terjadi perubahan dalam cara pendaftarannya. Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, bahwa setiap persekutuan komanditer harus melakukan pendaftaran secara elektronik. Terhadap persekutuan komanditer yang telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri, wajib didaftarkan kembali melalui sistem administrasi secara elektronik yang disebut juga pencatatan pendaftaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi di Kota Pekanbaru)? 2) Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menekankan pada kenyataan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenan dengan objek penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan sistem online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan. 2) Terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran, maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya.

**Kata Kunci :Pendaftaran, Persekutuan Komanditer.**

**REGISTRATION OF LIMITED PARTNERSHIP  
AFTER THE PUBLICATION OF MINISTER OF LAW  
AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 17 OF 2018  
(STUDY IN PEKANBARU CITY)**

**(Kharisma Descaliani, 1720122039, Magister of Notary, Faculty of Law,  
Andalas University, 83 Pages, 2020)**

**ABSTRACT**

Business entity is a form of company established by 2 (two) or more people with the pooling of capital to achieve certain goals, which one business entity that is widely used by society is limited partnership. A limited partnership is a form of company that is established by one or several people, fully responsible to one and one or more people as a party to release money to another party. Associated with limited partnership, currently Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 has been issued concerning the Registration of Limited Partnership Fellowships, that each limited partnership must register electronically, especially limited partnership that has been registered through the court, must be re-registered through an electronic administration system also called registration of registration. The problems discussed in this study are a). How to carry out about registration of limited partnership based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 (Pekanbaru City Study), b). What are the juridical consequences for limited partnership which does not register in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018. The research method used in this study is an empirical research method with an emphasis on reality in the field, then associated with aspects of law or legislation in effect with regard to the object of research. The results of this study are the implementation of registration of limited partnership based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 of 2018 there are a decrease in the interest of business actors to establish limited partnership, because business operators object to the licensing system which is considered detrimental to the company. Then the juridical consequences that occur when a limited partnership does not record registration is that the limited partnership frozen and considered a civil alliance in general. The suggestion in this research is that the government should conduct a review such as conducting a review such as conducting research, as well as conducting a trial run in advance whether these rules can be established or accepted in business activities. Then the regulation in Minister of Law and Human Rights needs to contain sanctions against business entities so that law enforcement can be carried out properly.

**Keywords:** Registration, Limited Partnership.